

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berlandaskan 4 pilar kebangsaan Indonesia yakni: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, , Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 24 karakter bangsa yaitu: bangga sebagai Bangsa Indonesia, berpikir positif, pantang menyerah, gotong-royong, bertoleransi dan menghargai kemajemukan, cinta damai, kejar prestasi, demokratis, kerja keras, anti diskriminatif, menghargai pendapat orang lain, sopan dan santun, rendah hati, sportif, lugas, berani bersaing, setia, satu kata dalam perbuatan, bersih (jujur), hormat kepada yang dituakan, rela berkorban, bermoral dan etis, serta saling percaya.

Merujuk dari pilar kebangsaan Indonesia, pembangunan kebudayaan Indonesia seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945 (amandemen ke-4) pembangunan terdapat lima pilar pembangunan yaitu: karakter bangsa, pelestarian budaya, penguatan karya dan diplomasi budaya, sumber daya manusia dan kelembagaan kebudayaan, serta sarana dan prasarana budaya. Upaya pembangunan kebudayaan semakin diperkuat dengan pengintegrasian antara fungsi pendidikan dan fungsi kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, dimana kebudayaan kembali bersatu dalam satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sebelumnya menyatu dengan Kementerian Pariwisata. Selain itu pula, dalam proses pembangunan Negara sejak tahun 1945 sampai sekarang telah tercatat dalam sejarah pemerintahan terdapat Wakil Menteri yang membidangi kebudayaan, dimana selama ini posisi struktural tertinggi pemerintahan yang khusus menangani bidang kebudayaan adalah seorang Direktur Jenderal. Hal ini membawa kemajuan dan percepatan dalam penyelesaian tugas-tugas strategis dalam pembangunan kebudayaan Indonesia.

Proses integrasi kebudayaan dalam fungsi pendidikan ini semakin memperkuat sasaran dan arah dari prioritas nasional

pembangunan kebudayaan sebagai upaya peningkatan karakter dan jati diri bangsa agar tertanam rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, serta sebagai identitas yang membedakan ciri bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya, tradisi, kesenian, film, dan sejarah merupakan aset bangsa yang tak ternilai sebagai modal dasar dalam pembangunan bangsa.

Kehidupan manusia dalam kesatuan bangsa juga merupakan suatu proses sosial budaya yang setiap saat mengalami perubahan dan pergerakan. Hal tersebut tentu akan menjadi catatan hidup manusia itu sendiri, baik di masa lampau yaitu periode kurun ke kurun sejarah atau pun kejadian di masa sekarang yang mungkin suatu saat akan mengalami perubahan atas dasar keinginan manusia sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, yang menjadikan kebudayaan bersifat dinamis. Pelestarian dan pewarisan nilai budaya yang terkandung dalam warisan budaya baik benda maupun tak benda memiliki arti yang sangat penting sebagai bukti akan kemasyauran masa lalu untuk menuju peradaban bangsa.

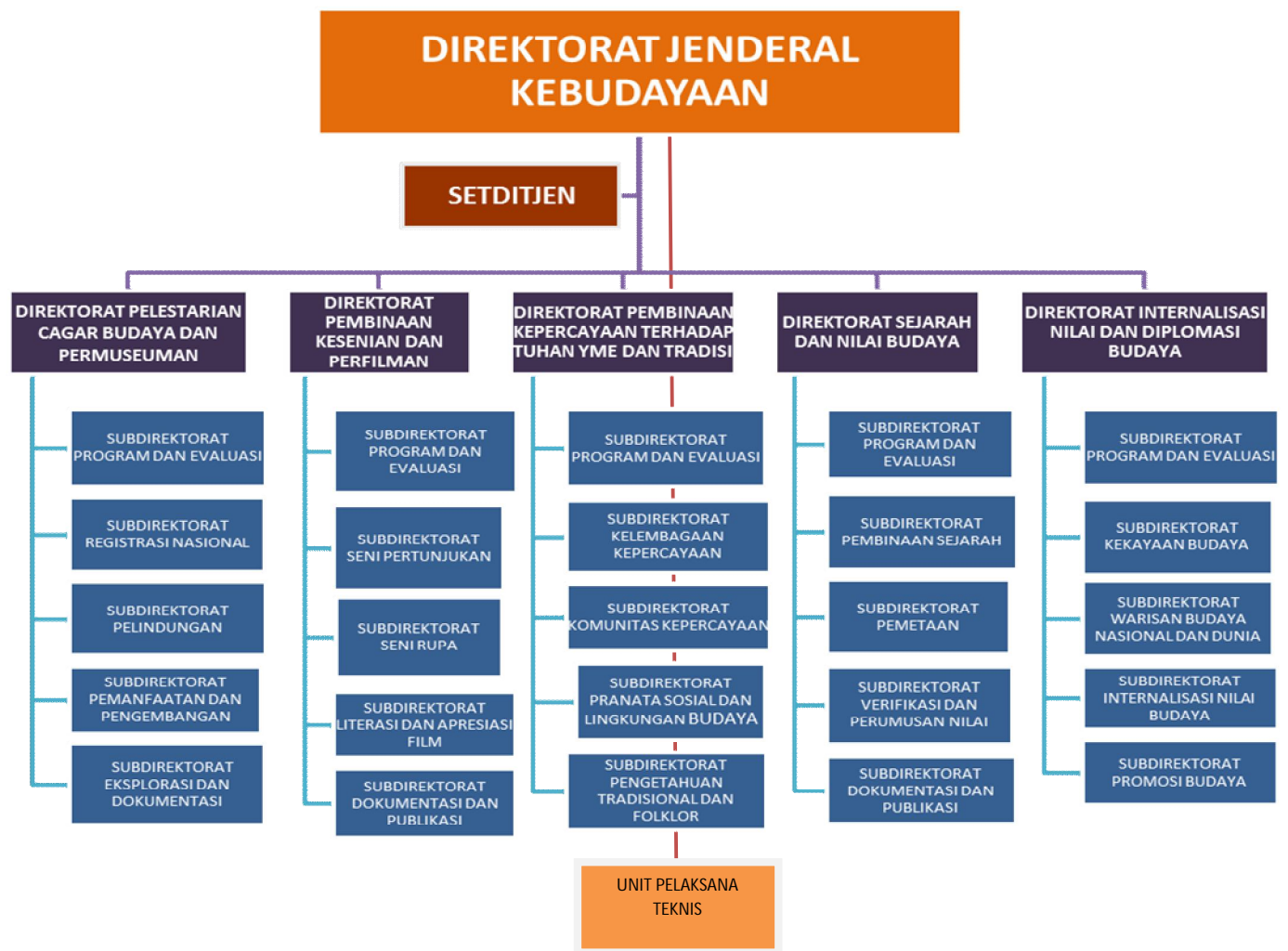
Pelestarian nilai budaya yang terkandung dalam aspek kesejarahan, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, cagar budaya, dan permuseuman merupakan potensi yang sangat baik apabila diintegrasikan dengan pendidikan sebagai bagian dari proses pembudayaan bangsa Indonesia.

B. Gambaran Direktorat Jenderal Kebudayaan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011, bidang Kebudayaan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perubahan ini telah berdampak tidak hanya pada nomenklatur kelembagaan serta tugas dan fungsi,

tetapi juga berdampak pada pengelolaan aset, kepegawaian, dan penganggaran.

Di bawah ini struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Perubahan tersebut sampai dengan semester II tahun 2012 dapat dicapai antara lain: di bidang kelembagaan telah dapat diselesaikan pembentukan struktur organisasi Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di bidang kepegawaian telah diselesaikan penempatan para pejabat eselon I, II, III, dan IV, beserta staf di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di bidang aset telah dilakukan serah terima antar kementerian dan telah dilakukan verifikasi.

Peran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan diharapkan mampu melaksanakan pembangunan kebudayaan nasional yang ditujukan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa, menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme,

memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010 – 2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010 – 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden Republik Indonesia yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN 2005 – 2025.

RPJMN juga memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga. RPJMN berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/lembaga tahun 2010 – 2014, selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014.

Adapun hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I, 2004 – 2009 telah membuahkan hasil yang menggembirakan, khususnya kehidupan budaya dan jatidiri bangsa yang kuat dan kreatif semakin dikembangkan. Hal ini sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, serta hak asasi manusia.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 memuat di dalamnya salah satu Program Prioritas Nasional yaitu Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan dalam rangka pembentukan jatidiri dan karakter bangsa. Substansi inti bidang kebudayaan adalah Penetapan dan Pembentukan Pengelola Terpadu Kawasan Cagar Budaya Nasional dan Dunia, dan Revitalisasi Museum.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, serta Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bab VII Pasal 529 sampai 672 menguraikan tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh satu Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima Direktorat dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.
- c. Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kesenian dan perfilman.
- d. Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.
- e. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang sejarah serta perumusan nilai budaya.
- f. Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kekayaan dan warisan budaya serta internalisasi nilai dan diplomasi budaya.

Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan Peraturan/Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, terdiri dari:

a. Unit Pelaksana Teknis Kepurbakalaan

1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh, dengan wilayah kerja: Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar, dengan wilayah kerja: Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau

3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, dengan wilayah kerja: Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung
4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, dengan wilayah kerja: Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat
5. Balai Pelestarian Cagar Budaya Prambanan, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah
6. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja: Provinsi DI Yogyakarta
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur
8. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar, dengan wilayah kerja: Provinsi Bali, NTT, dan NTB
9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan wilayah kerja: Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat
10. Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dengan wilayah kerja: Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur
11. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo
12. Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, dengan wilayah kerja: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua
13. Balai Konservasi Borobudur
14. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran

b. Unit Pelaksana Teknis Nilai Budaya

1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Nangroe Aceh Darussalam
2. Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, Sumatera Barat
3. Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
4. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, Jawa Barat
5. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
6. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
7. Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak, Kalimantan Barat
8. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Sulawesi Selatan
9. Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, Sulawesi Utara

10. Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon
11. Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua

c. Unit Pelaksana Teknis Permuseuman

1. Museum Nasional
2. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
3. Museum Kebangkitan Nasional
4. Museum Perumusan Naskah Proklamasi
5. Museum Sumpah Pemuda
6. Museum Basuki Abdullah

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Kebudayaan per 31 Desember 2012 adalah 3.541 orang, yang merupakan gabungan pegawai eks Ditjen Sejarah dan Purbakala sebanyak 2.937 orang dan eks Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film sebanyak 604 orang. Sedangkan jumlah juru pelihara yang merupakan pekerja honorer sebanyak 1.875, dengan tugas menjaga dan memelihara cagar budaya.

E. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut hasil amandemen ke 4 Undang-undang Dasar Tahun 1945, di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pembangunan kebudayaan Indonesia harus mampu mendukung misi pemerintah dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, serta pelestarian dan pengelolaan kebudayaan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, pembangunan kebudayaan juga memberikan penekanan pada membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Pembangunan kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005.

RPPNJP telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang. RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010-2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya, memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dan juga dalam rangka membuat pencapaian yang ideal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan review Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Ditjen kebudayaan menyusun Renstra 2010-2014 yang mengacu, mendukung, dan melengkapi Renstra Kemendikbud pada periode tahun yang sama.

Renstra bidang kebudayaan 2010-2014 memuat visi dan misi pembangunan kebudayaan yang sejalan dan mendukung visi dan misi Kemendikbud. Renstra ini juga memuat strategi, arah kebijakan dan program-program prioritas dari bidang kebudayaan. Keseluruhan strategi, arah kebijakan, dan program tersebut dalam rangka merespon kondisi umum internal dan eksternal, permasalahan, dan tantangan yang ada. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dalam rangka pembaharuan pendidikan dan kebudayaan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Tahun 2012 bidang kebudayaan, yang sebelumnya merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenparekraf, diintegrasikan kembali di bawah Kemendikbud. Paradigma strategi bidang kebudayaan, seperti tercakup dalam Renstra 2010-2014, adalah mengintegrasikan fungsi kebudayaan dengan pendidikan. Dalam hal ini, integrasi bukan sekedar menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan “*merging*” fungsi kebudayaan dan pendidikan. Integrasi harus berangkat dari tujuan untuk mempercepat upaya membangun insan Indonesia yang berpengetahuan dan berbudaya (beradab).

Pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan

Sebagai bentuk integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan diperlukan peningkatan pelayanan kebudayaan melalui:

- a. Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di bidang pendidikan;
- b. Pembenahan bahan pembelajaran sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan;
- c. Pemenuhan media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam kesenian Indonesia;
- d. Penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran sejarah/PPKN;
- e. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang kebudayaan.

Untuk memperkuat integrasi fungsi kebudayaan dalam pendidikan perlu penguatan budaya di masyarakat melalui pemberian fasilitasi sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sasana Sarasehan, Pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah, kegiatan berupa pemberian fasilitasi dahulu belum mempunyai standar dan kriteria yang jelas, untuk itu diperlukan pembuatan POS dan akreditasi dari lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang akan difasilitasi. Selain itu juga, media belajar untuk peserta didik secara langsung seperti museum, cagar budaya, dan taman budaya juga dilakukan revitalisasi sehingga dapat digunakan lebih optimal oleh peserta didik untuk mempelajari dan mengekspresikan kekayaan budaya Bangsa Indonesia.

Dalam kerangka pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi bidang kebudayaan tersebut, maka sejalan dengan integrasi Kebudayaan dan bidang Pendidikan menjadi Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu disusun Rencana

Strategis Pembangunan Bidang Kebudayaan yang akan menjadi dasar pihak dan arahan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan di tahun 2010 – 2014.

1. Visi dan Misi

Pembangunan Kebudayaan di Indonesia memiliki Visi:

“MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR, BERMARTABAT, DAN MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA”.

Hal-hal yang dapat dijelaskan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

MEMPERKUKUH	:	Memperkuat identitas kebudayaan dan jatidiri bangsa
KEBUDAYAAN INDONESIA	:	Keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia
MULTIKULTUR	:	Gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, tindakan masyarakat serta negara terhadap kesadaran pluralitas keagamaan dan kebudayaan untuk mengembangkan semangat kebangsaan

BERMARTABAT	:	Mampu mengangkat citra dan posisi bangsa dalam konteks pergaulan dunia
MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA	:	Mendapatkan pengakuan dan penghargaan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun dunia internasional

MISI BIDANG KEBUDAYAAN

Berdasarkan Visi Pembangunan Kebudayaan yang telah dijelaskan sebelumnya, Misi Pembangunan Kebudayaan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan;
- 2) Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa;
- 3) Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya;
- 4) Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa;
- 5) Internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya;
- 6) Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya kebudayaan di Indonesia;
- 7) Mengembangkan sumber daya kebudayaan yang berkualitas;
- 8) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan Rencana Strategis

MISI	1. Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan	2. Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi terhadap seni dan film sesuai dgn nilai-nilai budaya bangsa	3. Membina kepercayaan thd Tuhan YME dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya	4. Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa	5. Internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya	6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel
TUJUAN STRATEGIS	Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum di Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film	Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional & ekspresi bud. Tradisional	Peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, re-aktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya	Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa	Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan

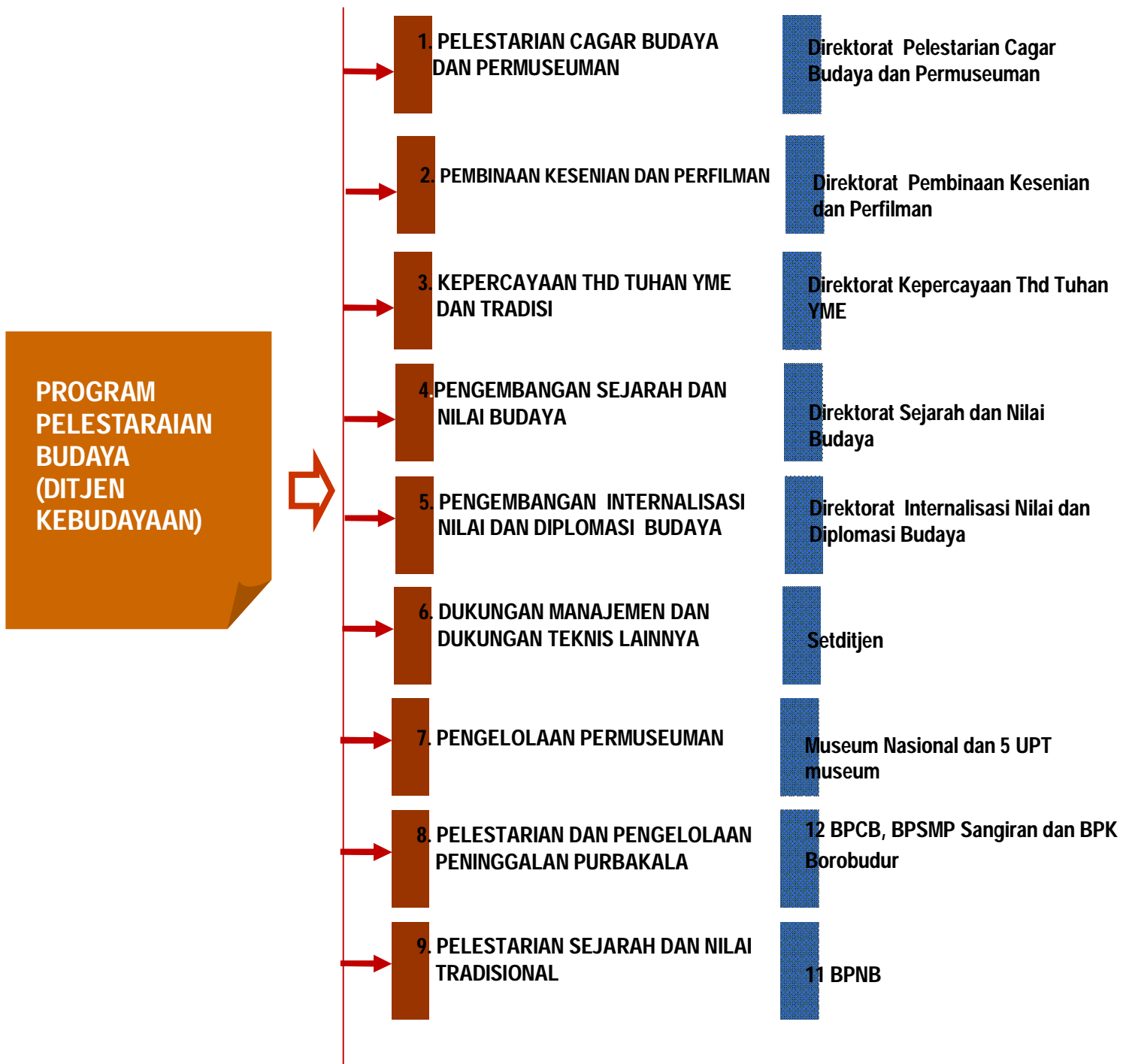
3. Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	1.1. Meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan	2.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film	3.1. Meningkatnya aktualisasi dan apresiasi tradisi	4.1. Meningkatnya inventarisasi, penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya	5.1. Meningkatnya pengembangan dan penanaman nilai-nilai budaya/kebangsaan	6.1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	1.2. Meningkatnya museum yang terakreditasi dan direvitalisasi	2.2. Meningkatnya karya seni dan film	3.2. Meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya	4.2. Meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	5.2. Meningkatnya diseminasi internasionalisasi	6.2. Meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola
	1.3. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum	2.3. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film	3.3. Meningkatnya aktualisasi dan apresiasi nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan YME	4.3. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya	5.3. Meningkatnya kekayaan dan warisan budaya yang tercatat sbg warisan nasional & warisan dunia	6.3. Meningkatnya kualitas manajemen sdm
	1.4. Meningkatnya kemanfaatan cagar budaya dan museum terhadap		3.4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas peran kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas		5.4. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan lintas budaya	

	kesejahteraan masyarakat		adat, & pelaku tradisi		antar bangsa	
			3.5. Meningkatnya perlindungan & pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional			

4. Program dan Kegiatan Tahun 2012

Program-program Pembangunan Bidang Kebudayaan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan ini melingkupi: (1) Pelestarian cagar budaya dan permuseuman; (2) Pembinaan kesenian dan perfilman; (3) Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan yang mahaesadan tradisi; (4) Pembinaan sejarah dan nilai budaya; (5) Internalisasi nilai dan diplomasi budaya; (6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud; (7) Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala; (8) Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya; dan (9) Pengelolaan Permuseuman.



Program Pelestarian Budaya dapat dicapai dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
2. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Perfilman
3. Kegiatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
4. Kegiatan Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya

5. Kegiatan Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
6. Kegiatan Pengelolaan Permuseuman
7. Kegiatan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
8. Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
9. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

I. KEGIATAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum di Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya;
2. Peningkatan kualitas pameran, pengelolaan dan pelayanan Museum di Indonesia
3. Peningkatan jumlah apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum

Sasaran strategis kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman adalah:

1. Meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan
2. Meningkatnya museum yang terakreditasi dan direvitalisasi
3. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum
4. Meningkatnya kemanfaatan cagar budaya dan museum terhadap kesejahteraan masyarakat

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Penyusunan naskah rumusan kebijakan pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
2. Penyelenggaraan bimbingan teknis;
3. Revitalisasi museum;

4. Penyelenggaraan event apresiasi cagar budaya dan museum;
5. Registrasi cagar budaya;
6. Pembangunan museum;
7. Pengelolaan cagar budaya;
8. Revitalisasi cagar budaya;
9. Pendokumentasian koleksi museum;
10. Pemantauan dan evaluasi;
11. Eksplorasi cagar budaya bawah air;
12. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian cagar budaya dan museum.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada berikut:

	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN INDIKATOR	2012	2013	2014	SUMBER DATA
1	PENINGKATAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA					
1.1.	Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran dan Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	4	8	12	
1.2.	Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum	Dokumen	8	8	8	
1.3.	Cagar Budaya yang diregistrasi dan yang ditetapkan secara nasional	Cagar budaya	5.010	7.500	9.990	
1.4.	Cagar budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	4.100	4.500	4.900	
1.5.	Tenaga Kerja yang diciptakan dari pemanfaatan cagar budaya dan museum	Orang	455	1.000	1.545	
1.6.	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya dan Museum	Orang	1.600.000	2.500.000	3.400.000	
1.7.	Museum yang Direvitalisasi	Museum	11	30	49	
1.8.	Akreditasi Museum	Museum	30	70	110	

	PROGRAM/KEGIATANPRIORITAS	SATUAN INDIKATOR	2012	2013	2014	SUMBER DATA
7.	PENGLOLAAN PERMUSEUMAN					
7.1.	Koleksi Museum yang Dikelola	Koleksi museum	3.000	7.500	12.000	
7.2.	Museum yang direvitalisasi	Museum	5	5	5	
7.3.	Luas Pengembangan dan Penataan Gedung C Museum Nasional	M2 bangunan	2.000	10.000	18.000	
7.4.	Masyarakat yang mengapresiasi Museum	Orang	500.000	1.000.000	1.500.000	
8.	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA					
8.1.	Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Cagar budaya	2.300	3.000	3.700	
8.2.	Inventarisasi dan pendaftaran peninggalan purbakala	Cagar budaya	2.600	5.000	7.400	
8.3.	Pengkajian pelestarian tinggalan purbakala	Dokumen	56	85	114	
8.4.	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	Orang	1.500.000	3.000.000	4.500.000	

II. KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, apresiasi masyarakat terhadap seni dan film, serta memberikan media sarana untuk satuan pendidikan meningkatkan apresiasi dan bakat peserta didik dalam berkesenian khususnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan seni dan film
3. Peningkatan kuantitas pelaku seni dan film dalam membuat karya budaya
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesenian dan perfilman

Sasaran strategis kegiatan pembinaan kesenian dan perfilman adalah:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film
2. Meningkatnya karya seni dan film
3. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kesenian dan perfilman

Pembinaan Kesenian dan Perfilman dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Penyusunan naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan kesenian dan perfilman;
2. Revitalisasi Taman Budaya;
3. Apresiasi kesenian dan perfilman;
4. Revitalisasi karya seni;
5. Pendokumentasian karya seni dan film;
6. Fasilitas kesenian dan perfilman;
7. Fasilitas produksi film pendek dan dokumenter;
8. Fasilitas kesenian disatuan pendidikan;
9. Bimbingan teknis;
10. Pemantauan dan evaluasi.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada berikut:

	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN INDIKATOR	2012	2013	2014	SUMBER DATA
2	PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAKU SENI DAN FILM					
2.1.	Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran dan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	-	8	16	
2.2.	Pelaku, organisasi, dan komunitas seni dan film yang berkarya	Orang/ organisasi/ sanggar	-	250	500	
2.3.	Karya seni yang direvitalisasi	Karya seni	-	15	30	
2.4.	Karya seni yang terdokumentasi	Karya seni	-	300	600	
2.5.	Fasilitasi pertunjukan, pameran, festival, lomba, dan seni	Event	-	40	80	
2.6.	Rancangan skenario/film yang berbasis nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal	Naskah	-	10	20	
2.7.	Fasilitasi produksi karya film yang mengangkat nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal	Karya	-	10	20	
2.8.	Pengunjung/ apresiator seni	Orang	-	2.000.000	4.000.000	
2.9.	Durasi waktu tayang film nasional	Jam	-	30%	35%	
2.10	Naskah Rumusan Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	Naskah	-	7	14	
2.11.	Dokumen Laporan Dokumentasi dan Publikasi	Dokumen	-	6	12	

III. KEGIATAN PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional & ekspresi budaya tradisional. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman multikultur dan penguatan kearifan lokal
2. Peningkatan peran stakeholder dalam keragaman budaya dan kearifan lokal
3. Penguatan dan pelestarian kepercayaan dan tradisi yang hampir punah khususnya

Sasaran strategis pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dan tradisi adalah:

1. Meningkatnya aktualisasi dan apresiasi tradisi

2. Meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya
3. Meningkatnya aktualisasi dan ekspresi nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas peran kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa, komunitas adat, dan pelaku tradisi
5. Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional

Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Penyusunan naskah rumusan kebijakan pembinaan kepercayaan dan pelestarian nilai kepercayaan dan tradisi;
2. Inventarisasi lembaga budaya yang terinventarisasi;
3. Pendokumentasian kepercayaan dan tradisi;
4. Fasilitasi komunitas budaya ;
5. Apresiasi pengetahuan dan ekspresi budaya kepercayaan dan tradisi;
6. Pemberdayaan kepercayaan dan tradisi;
7. Perencanaan dan evaluasi.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada berikut:

	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN INDIKATOR	2012	2013	2014	SUMBER DATA
3.	PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA					
3.1.	Dokumen Program Kegiatan, Anggaran, Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	8	16	
3.2.	Dokumen Laporan Dokumentasi dan Publikasi	Dokumen	9	11	13	
3.3.	Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang terlindungi	Karya budaya	33	50	67	
3.4.	Karya Budaya Tradisional yang Diaktualisasikan	Karya budaya	8	15	22	
3.5.	Peserta Pemberdayaan Kepercayaan dan Tradisi	Orang	1.319	3.000	4.681	
3.6.	Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Dokumen	3	5	7	
3.7.	Organisasi yang sudah di fasilitasi	Paket	36	125	214	

IV. KEGIATAN PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Kegiatan ini bertujuan peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, reaktualisasi dan adaptasi sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah
2. penguatan jati diri dan karakter bangsa dengan penggalian nilai-nilai luhur budaya bangsa

sasaran strategis kegiatan pembinaan sejarah dan nilai budaya adalah :

1. meningkatnya inventarisasi penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya
2. meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat
3. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya

Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Penyusunan naskah rumusan dan kebijakan pengembangan sejarah dan nilai budaya;
2. Pembuatan buku sejarah dan nilai budaya;
3. Apresiasi sejarah dan nilai budaya;
4. Penyusunan buku hasil verifikasi dan perumusan nilai;
5. Pendokumentasian sejarah dan nilai budaya;
6. Fasilitas even sejarah dan nilai budaya;
7. Fasilitas Rumah Budaya Nusantara;
8. Bimbingan teknis;
9. Penyusunan atlas sejarah;
10. Pemantauan dan evaluasi;
11. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan sejarah dan nilai budaya.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada berikut:

	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN INDIKATOR	2012	2013	2014	SUMBER DATA
4.	PENGEMBANGAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA					
4.1.	Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, dan Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	-	8	16	
4.2.	Dokumen Sumber Sejarah dan Nilai Budaya yang Terdokumentasi	Dokumen	4	8	12	
4.3.	Buku Sejarah dan Nilai Budaya yang Ditulis	Dokumen	5	10	15	
4.4.	Peta Sejarah dan Nilai Budaya yang Disusun	Peta	2	8	14	
4.5.	Nilai-nilai Sejarah dan Budaya yang diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat	Event	-	11	22	
4.6.	Nilai-nilai Sejarah dan Budaya yang diadaptasi dalam kehidupan bermasyarakat	Event	-	6	12	
4.7.	Peserta Apresiasi Sejarah dan Nilai Budaya	Orang	6.175	9.250	12.325	
4.8.	Dokumentasi dan Publikasi Sejarah dan Nilai Budaya	Dokumen	-	10	20	
4.9.	Naskah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	Dokumen	-	5	10	

V. KEGIATAN INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA

Kegiatan ini bertujuan peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan budaya dan apresiasi budaya
2. Peningkatan Nilai-nilai dan pengemasan budaya
3. Peningkatan Hubungan budaya antar bangsa

Sasaran strategis kegiatan internalisasi nilai dan diplomasi budaya adalah:

1. Meningkatnya pengemasan dan penanaman nilai-nilai budaya/kebangsaan
2. Meningkatnya diseminasi internalisasi
3. Meningkatnya kekayaan dan warisan budaya yang tercatat sebagai warisan nasional dan warisan dunia
4. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan lintas budaya antar bangsa

Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Penyusunan naskah rumusan dan kebijakan pengembangan internalisasi nilai dan diplomasi budaya;
2. Internalisasi nilai budaya;
3. Warisan budaya nasional dan dunia yang dikelola;
4. Warisan budaya nasional yang dinominasikan;
5. Rumah budaya Indonesia yang difasilitasi;
6. Even diplomasi budaya yang difasilitasi;
7. Kekayaan budaya yang ditetapkan;
8. Pemantauan dan evaluasi;
9. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan internalisasi nilai dan diplomasi budaya.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada berikut:

	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN INDIKATOR	2012	2013	2014	SUMBER DATA
5	INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA					
5.1.	Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran dan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	8	16	24	
5.2.	Kekayaan budaya yang didokumentasikan dan ditetapkan	Karya budaya	300	600	900	
5.3.	Warisan Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia yang dilestarikan dan dikelola	Warisan budaya	30	60	90	
5.4.	Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Dokumen	5	10	15	
5.5.	Peserta diseminasi dan internalisasi	Orang/ peserta	1.500	3.000	4.500	
5.6.	Kegiatan Diplomasi budaya yang dilaksanakan	Event	15	30	45	
5.7.	Fasilitasi Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Paket	20	40	60	

VI. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BIDANG KEBUDAYAAN.

Kegiatan ini bertujuan peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas dan kuantitas peraturan perundangan yang mengatur tentang pembangunan kebudayaan
2. Peningkatan layanan publik dan tata kelola organisasi
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran strategis kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang kebudayaan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola
3. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian

	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN INDIKATOR	2012	2013	2014	SUMBER DATA
6.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA					
6.1.	Layanan Bidang Hukum	Paket	3	10	17	
6.2.	Layanan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program	Paket	9	10	11	
6.3.	Layanan Bidang Keuangan	Paket	1	3	5	
6.4.	Layanan Kepegawaian	Paket	4	7	10	
6.5.	Layanan Bidang Kerjasama Antar Instansi	Paket	2	6	10	
6.6.	Layanan Bidang Kehumasan	Paket	3	10	17	
6.7.	Layanan Perkantoran	Paket	12	12	12	
6.8.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Paket	151	200	249	
6.9.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Paket	15	50	85	

indikator kinerja kegiatan seperti yang disajikan pada berikut:

B. Rencana Kinerja Tahun 2012

Program pelestarian budaya bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pelestarian kekayaan budaya yang meliputi Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman, Pembinaan Kesenian Dan Perfilman, Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Tradisi, Pembinaan Sejarah Dan Nilai Budaya, Internalisasi Nilai Dan Diplomasi Budaya, Dan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di Bidang Kebudayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Rencana Kinerja Tahun 2012 Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

TABEL: RENCANA KINERJA TAHUN 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2012
1.	Peningkatan pelestarian cagar budaya di Indonesia, kualitas museum di Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum	1. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	6.470
		2. Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi	3.000.000
		3. Jumlah rumah budaya di luar negeri	0
		4. Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan	0
2.	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya	5. Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya	12.500.000
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film	6. Jumlah sekolah yang Difasilitasi Sarana Budaya	1.400
		7. Jumlah Fasilitas Film yang Berkarakter	20
		8. Jumlah Komunitas Budaya yang Difasilitasi	200

C. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai Rencana Kinerja Tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas dilakukan kegiatan dan aktivitas yang dikuatkan dengan penetapan kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Amanah untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pembangunan kebudayaan dengan menggunakan anggaran APBN-P 2012 mengacu kepada Rencana Strategis Kebudayaan. Seharusnya hal ini juga dilakukan penetapan kinerja/kontrak kinerja, tetapi karena merupakan dana alokasi anggaran dari APBN-P 2012 yang berlaku pada pertengahan tahun anggaran maka tidak dilakukan penetapan kinerja/kontrak kinerja. Namun demikian, Direktorat Jenderal Kebudayaan tetap membuat target capaian kinerja untuk pelaksanaan anggaran APBN-P 2012 sebagaimana tercantum dalam Rencana kinerja Tahun 2012.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2012	Alokasi Anggaran 2012 (ribu rupiah)	Keterangan
1.	Peningkatan pelestarian cagar budaya di Indonesia, kualitas museum di Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum	1. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	6.470	122.700.000	
		2. Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi	3.000.000	52.000.000	
		3. Jumlah rumah budaya di luar negeri	0	0	

		4. Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan	0	0	
2.	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya	5. Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya	12.500.000	123.500.000	
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film	6. Jumlah sekolah yang Difasilitasi Sarana Budaya	1.400	242.000.000	
		7. Jumlah Fasilitas Film yang Berkarakter	20	24.500.000	
		8. Jumlah Komunitas Budaya yang Difasilitasi	200	46.500.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A. Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2012

Pelestarian budaya sebagai rangkaian kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kebanggaan, penghargaan, dan keikutsertaan masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pengembangan sejarah dan nilai budaya, pembinaan kesenian dan perfilman, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, internalisasi nilai dan diplomasi budaya, pengelolaan permuseuman, pengelolaan peninggalan purbakala, dan pelestarian sejarah dan tradisional .

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk menghimpun dan melaporkan kinerja dan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2012 dan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis tahun 2012 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan akuntabilitas kinerja memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja utama yaitu membandingkan rencana kinerja tahun 2012 dengan realisasi *output* dan *outcome*-nya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2012, sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa datang.

Berikut ini akan diuraikan realisasi pencapaian sasaran Program Pelestarian Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2012 yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Analisis Kinerja

Setiap akhir periode, suatu instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan membandingkan antara target kinerja dan realiasi kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai suatu organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) dan tindakan perbaikan yang diperlukan di masa datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal maupun eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Program Pelestarian Budaya berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target capai kinerja pada Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2012 sebagai berikut:

I. CAPAIAN KINERJA UTAMA PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA

Berikut tingkat ketercapaian beberapa sasaran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diukur/dilihat dari tingkatan ketercapaian Indikator Kinerja Utama Program Pelestarian Budaya.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis 1: Peningkatan pelestarian cagar budaya di Indonesia, kualitas museum di Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2012		
			Target	Realisasi	%
1	Peningkatan pelestarian cagar budaya di Indonesia, kualitas museum di Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum	1. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	6.470	0	0
		2. Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi	3.000.000	5.754.884	192

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama "Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan"

Pelestarian cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya baik di darat maupun hasil pengangkatan di air, meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pelestarian cagar budaya saat ini harus menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah melestarikan cagar budaya dengan target indikator kinerja utama "Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan" sebanyak 6.470 Cagar Budaya selama tahun anggaran 2012.

Realisasi atau capaian kinerja "jumlah cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2012 tidak dapat direalisasikan atau prosentase capaian sebesar 0 %.

Kinerja utama tersebut tidak dapat dicapai karena target beberapa kinerja kegiatan tidak dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Jumlah cagar budaya yang didaftar dan ditetapkan sebanyak 1.000 cagar budaya
2. Jumlah cagar budaya yang didokumentasikan sebanyak 5.000 cagar budaya
3. Jumlah koleksi museum yang dikelola sebanyak 470 koleksi

Ketidaktercapaian kinerja utama tersebut disebabkan karena:

1. Belum selesainya pembuatan system registrasi nasional cagar budaya secara *on-line*
2. Belum dilaksanakannya pembinaan teknis petugas pendaftar cagar budaya di daerah
3. Belum terfasilitasi pendaftaran cagar budaya di daerah.

Pemugaran, rehabilitasi, revitalisasi, penyusunan Masterplan, DED, konservasi, dan pembebasan lahan.

1. Pengembangan Situs Sangiran sebanyak 3 cagar budaya (pembangunan fisik dan interior museum Kluster Dayu, aktualisasi Masterplan dan DED pengembangan situs Sangiran, pengembangan program publik, pengadaan alat laboratorium, dan penataan lingkungan kluster Krikilan)
2. Pengembangan situs Kawasan Percandian Muarajambi sebanyak 5 CB (Pengupasan Candi Kedaton, Pemugaran Pagar dan Gapura Candi Gumpung, Pembebasan Tanah, Pembuatan Fasilitas Penunjang, Pembuatan Masterplan Pelestarian Kawasan Percandian Muarajambi, rehabilitasi gedung koleksi dan gedung kantor dan pelatihan keterampilan dan pengetahuan pemuda sekitar Kawasan Percandian Muarajambi ke desa wisata budaya.
3. Revitalisasi Kraton Banten Lama
Kegiatan Revitalisasi, Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Banten Lama.

Maksud dan Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah membuat gambar rancangan/desain sebagai tindak lanjut dari kegiatan Detail Engineering Desain (DED) yang menyangkut aspek teknis teknologis dan administrative. Gambar rancangan/desain dapat digunakan untuk kepentingan proses pelelangan, proses pelaksanaan fisik dan pemanfaatannya (pasca konstruksi) di Kawasan Kepurbaklaan Provinsi Banten. Tujuannya adalah agar pelaksanaan Penataan dan

perbaikan Kondisi Fisik di Kawasan Banten lama dapat terealisasi dengan baik sehingga tepat sasaran sesuai rencana, baik secara mutu, waktu, biaya dan pemanfaatannya.

4. Revitalisasi Makam Maulana Malik, Gresik

Uraian Kegiatan: kegiatan ini terdiri dari Pemugaran Bangunan Pelindung Makam dan Pembangunan Sarana Peziarah.

5. Revitalisasi Kawasan Kota Gede

Revitalisasi Kawasan Kotagede terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Pemugaran Benteng Cepuri

b. Pemugaran Kompleks Makam dan Masjid Mataram Kotagede

c. Pemugaran Rumah Tradisional di Kotagede yaitu rumah Bapak Charis Zubaer.

6. Rehabilitasi Gedung Museum Kebangkitan Nasional Jakarta
Kegiatan Rehabilitasi Gedung Museum Kebangkitan Nasional Jakarta.

Uraian Singkat Kegiatan ini adalah membuat gambar rancangan/desain sebagai tindak lanjut dari kegiatan Detail Engineering Desain (DED) yang menyangkut aspek teknis teknologis dan administrative. Gambar rancangan/desain dapat digunakan untuk kepentingan proses pelelangan, proses pelaksanaan fisik dan pemanfaatannya (pasca konstruksi) di Gedung Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Tujuannya adalah agar pelaksanaan Penataan dan perbaikan Kondisi Fisik Gedung Museum Kebangkitan Nasional Jakarta dapat terealisasi dengan baik sehingga tepat sasaran sesuai rencana, baik secara mutu, waktu, biaya dan pemanfaatannya.

7. Rehabilitasi candi Bima Dieng

Pada tahun anggaran 2012 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah melalui dana APBNP tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Candi Bima Kompleks Candi Dieng Kabupaten Banjarnegara Tahap I. Pada Tahap ini sasaran utama kegiatan adalah pembongkaran total seluruh bangunan, ekskavasi dan penelitian bagian bawah bangunan candi serta pembuatan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi. Dalam proses pembongkaran bangunan, dilakukan juga pemasangan roofing yang bertujuan untuk memberi atap pada bangunan sehingga pada saat dilaksanakan

pemugaran, dapat melindungi bangunan dan pekerja dari cuaca yang cepat berubah. Pembongkaran dilakukan secara lapis per lapis. Batu-batu hasil bongkaran disusun lagi secara terbalik agar memudahkan pekerjaan pada saat pemasangan kembali (rebuilding). Selama proses pembongkaran juga dilakukan kegiatan konservasi pada tiap-tiap bagian batu candi, yaitu pembersihan, penyambungan dan pengawetan. Setelah seluruh komponen batu penyusun bangunan selesai dibongkar dilakukan kegiatan penelitian dan ekskavasi dengan membuka 6 (enam) kotak galian. Pada saat penggalian ditemukan kotak peripih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah cawan atau lepek dari bahan perunggu, lempengan emas, biji-bijian, dan tulang.

Sebagai upaya berkelanjutan dari pelestariannya, kegiatan Rehabilitasi Candi Bima Kompleks Candi Dieng Kabupaten Banjarnegara direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun 2013 berupa pembuatan pondasi perkuatan bangunan dan penyusunan kembali bangunan candi (rebuilding).

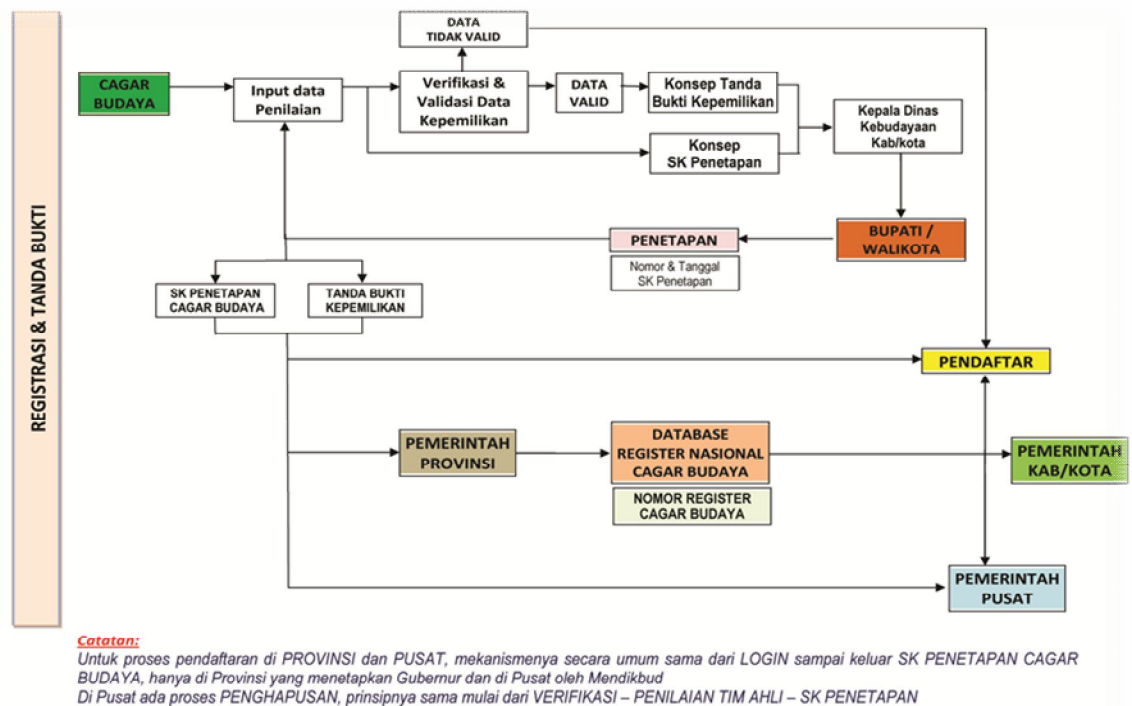
8. Revitalisasi cagar budaya: kesultanan Kutai Kertanegara, Revitalisasi Keraton Tayan, Revitalisasi Lamin Pepas Eheng, Revitalisasi Lamin Mancong, dan Revitalisasi Pasanggrahan Negara Kota Palangkaraya)

Indikator kinerja kegiatan, jumlah cagar budaya yang dipelihara, dengan target kinerja kegiatan sebanyak 5 Cagar Budaya, dengan capaian sebanyak 5 (lima) cagar budaya, atau 100 %. Kinerja kegiatan ini dicapai dengan beberapa kegiatan yaitu, 1. Revitalisasi Istana Kesultanan Kutai Kartanegara di Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim 2. Revitalisasi Keraton Kerajaan Tayan di Kab. Sanggau, Kalbar, 3. Revitalisasi Pesanggrahan Negara Kota Palangkaraya di Kota Palangkaraya, Kalteng, 4. Revitalisasi Lamin Mancong di Kab. Kutai Barat, Kaltim dan 5. Revitalisasi Lamin Pepas Eheng di Kab. Kutai Barat, Kaltim

Register Nasional Cagar Budaya

Register nasional cagar budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan luar negeri (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*)

Program Registrasi Nasional Cagar Budaya bertujuan untuk menyusun daftar/data cagar budaya nasional, dengan alur pendaftaran hingga penetapan sebagai berikut:



Pelestarian warisan budaya Indonesia, pada tahun 2012 telah berhasil diakui oleh Unesco sebagai warisan budaya dunia, yaitu:

a. Penominasian warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia bendawi (UNESCO)



Subak sebagai warisan dunia telah ditetapkan pada sidang ke-36 Komite Warisan Dunia Unesco di St. Petersburg, Federasi Rusia pada tanggal 29 Juni 2012. Komite telah menetapkan *"The Cultural Landscape of Bali Province: the*

Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy" untuk dimasukkan dalam daftar warisan dunia (UNESCO World Heritage List).

Hakikat mendasar Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhannya, Manusia dengan alam lingkungannya, dan Manusia dengan sesamanya. Dengan menerapkan falsafah tersebut diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan *individualisme* dan *materialisme*. Membudayakan *Tri Hita Karana* karena akan dapat memupus pandangan yang mendorong *konsumerisme*, pertikaian dan gejolak.

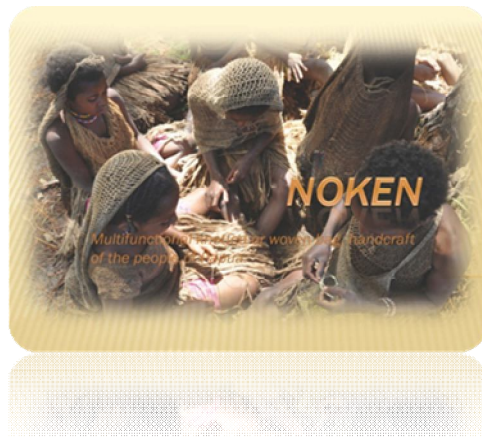
Warisan budaya dunia Subak terdiri atas empat kawasan dalam satu kesatuan pengelolaan:

- 1) Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur (Kabupaten Bangli), sebagai pura suci untuk pengelola Subak di Bali;
- 2) Subak dan Pura pada DAS Pakerisan (Kabupaten Gianyar), sebagai kawasan arkeologi yang membuktikan adanya tradisi subak sejak abad 9M;
- 3) Subak dan Pura Caturangga batukaru (Kabupaten Buleleng dan Tabanan) sebagai gambaran utuh ekosisten subak di provinsi Bali;

- 4) Pura Taman Ayun (Kabupaten Badung), pura kerajaan yang berperan pula sebagai pura subak bagi kawasan Mengwi-Badung.

b. Penominasian warisan budaya dunia Noken

Penominasian warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia tak benda setelah wayang, keris, Batik, Angklung dan Tari Saman, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2012 di Paris, Perancis, melalui sidang ke-7 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* telah menetapkan Noken, Papua, masuk dalam daftar Warisan Budaya Takbenda-UNESCO.



Awal tahun 2011, Noken dinominasikan sebagai warisan budaya takbenda-UNESCO oleh pemerintah Indonesia, dengan kriteria “*in need of urgent safeguarding*” atau warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak.

Noken merupakan kantong tradisional masyarakat Papua serbaguna yang dibuat dengan teknik anyam dan rajut. Dibuat dari serat kayu, daun atau batang anggrek yang dipilin hingga menjadi benang kemudian dianyam. Setidaknya ada 250 kelompok etnis di Papua dan Papua Barat yang mengenal Noken dengan penamaan yang berbeda-beda dan variasi bentuknya.

Meskipun nampak sederhana, kemahiran menjalin benang ini pada dasarnya hanya boleh dilakukan oleh perempuan Papua sebagai tanda kedewasaan. Seorang perempuan Papua yang belum bisa membuat noken dianggap belum dewasa dan tidak layak untuk menikah. Noken juga melambangkan kesuburan seorang perempuan. Pembuatan noken memerlukan keterampilan yang diajarkan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya.

2. Indikator Kinerja Utama "Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi "

Presiden Indonesia menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan, khususnya prioritas 11 : Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi, dan Teknologi, diantaranya adalah Revitalisasi Museum di Indonesia. Guna mendukung instruksi Presiden tersebut, revitalisasi museum dijadikan salah satu program unggulan yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan 2010 – 2014. Revitalisasi museum ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya, sehingga museum dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk dikunjungi.

Ada enam aspek dalam revitalisasi museum yaitu fisik, manajemen, jejaring, program, kebijakan, dan pencitraan. Keenam aspek ini diimplementasikan di museum-museum seluruh Indonesia tahun 2010 – 2014. Pelaksanaan keenam aspek tersebut mengacu pada tiga pilar kebijakan permuseuman di Indonesia yaitu mencerdaskan bangsa, membentuk kepribadian bangsa (karakter bangsa), serta menanamkan konsep ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.

Target kinerja jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi sebanyak 3.000.000 pengunjung dapat direalisasikan sebanyak 5.754.884 Pengunjung atau 192 %.

Jumlah pengunjung Museum tersebut terdiri dari:

- Pengunjung Umum sebanyak 2.762.344 orang atau 48 %
- Pengunjung Mahasiswa sebanyak 2.877.442 orang atau 50 %
- Pengunjung Wisata Manca Negara 115.098 orang atau 2 %

Kinerja tersebut dapat tercapai melalui kegiatan:

- a. Revitalisasi fisik museum
- b. Sosialisasi Gerakan Nasional Cinta Museum
- c. Gelar Museum Nusantara
- d. Pemilihan Duta Museum 2012

Aktivitas utama yang dilakukan untuk pencapaian target ini sehingga realisasi capaian melebihi target sebesar 92 % di antaranya melalui :

Gelar Museum Nusantara

Gelar Museum Nusantara merupakan kegiatan pameran bersama yang diikuti oleh seluruh museum di 33 Provinsi yang bertujuan untuk menampilkan museum kepada publik dengan warna yang berbeda agar dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum.

Banyaknya Museum yang berpartisipasi pada pameran ini berjumlah 126 museum, partisipasi dapat berupa penyajian koleksi dan alat-alat publikasi seperti leaflet karena keterbatasannya untuk menampilkan koleksi.

Kegiatan Gelar Museum Nusantara ini berlangsung dengan penuh antusiasisme dari masyarakat dan pelajar, berikut beberapa foto dari kegiatan Gelar Museum Nusantara 2012:



Peresmian Gelar Museum Nusantara oleh Ibu Wakil Menteri Bidang Kebudayaan dan kegiatan Talkshow dengan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.



Gelar Museum Nusantara

Pemilihan Duta Museum 2012

Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menyelenggarakan Pemilihan Duta Museum dari *Public Figure*, terpilihlah Sigi Wimala sebagai Duta Museum Nasional. Sebagai tindak lanjut dan kontinuitas dalam kegiatan ini, diperlukan sebuah gerakan nyata dalam bentuk aktivitas Pemilihan Duta Museum Daerah yang berfungsi sebagai wakil pendamping Duta Museum yang telah ada



untuk aktif dalam menginformasikan dan mengkomunikasikan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di museum dalam rangka pencitraan museum ke masyarakat dan sekaligus

mencari Duta-Duta Museum dari daerah.

Atas dasar tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Direktorat



Jenderal Kebudayaan telah menetapkan sebuah program pada tahun 2012 ini menitikberatkan pada sosialisasi dan kampanye publik tentang museum yang bertujuan untuk mencari Duta-Duta Museum dari daerah di seluruh Provinsi

Indonesia dalam rangka membantu Duta Museum untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan gerakan nasional masyarakat Indonesia untuk mencintai museum.

Sasaran program Pemilihan Duta Museum Daerah dalam rangka mensosialisasikan dan kampanye ini adalah terpilihnya pasangan Duta Museum Daerah dari seluruh provinsi di Indonesia yang akan



turut mendorong terbangunnya paradigma baru tentang peran dan fungsi museum, dengan menjadikan Putra Putri Daerah sebagai ujung tombak akan pencitraan museum dimasa mendatang maupun sebagai ajang edukasi dan kompetisi

gobal.

Pada tahun ini telah terpilih 65 Duta Museum yang berasal dari 33 Provinsi di Indonesia

Sosialisasi Gerakan Nasional Cinta Museum

Saat ini kesadaran masyarakat berkunjung ke museum masih dinilai rendah. Untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke museum, diperlukan sosialisasi tentang museum. Sosialisasi ini telah berjalan sejak tahun 2010 dengan dilaksanakannya program Visit Museum Year serta Gerakan Nasional Cinta Museum. Media kampanye ini dilanjutkan dengan sosialisasi dan kampanye publik tentang museum melalui media.

Pemasyarakatan Museum Melalui Media memiliki tujuan dan sasaran yang akan dicapai demi terciptanya minat masyarakat untuk berkunjung ke museum. Melalui Pemasyarakatan Museum Melalui Media ini diharapkan dapat, memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan serta memupuk rasa cinta museum di kalangan masyarakat melalui media elektronik seperti televisi dan radio sehingga membangun komunikasi aktif antara museum dan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan berupa produksi dan penayangan film dokumenter tentang permuseuman di media televisi, program talkshow di media televisi dan radio, iklan layanan masyarakat di televisi dan radio.

Sasaran strategis 2: Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2012		
			Target	Realisasi	%
2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya	3	Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya	12.500.000	13.117.149	105

Indikator Kinerja Utama “Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya ”

Target peserta apresiasi sejarah dan karya budaya dengan target sebanyak 12.500.000 orang dapat tercapai sebanyak 13.117.149 orang, atau 105 %.

Jumlah peserta tersebut dicapai dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu:

1. Lawatan Sejarah Nasional
2. Pekan Nasional Cinta Sejarah
3. Kemah Wilayah Perbatasan
4. Arung Sejarah Bahari
5. Persemaian Nilai Budaya sebagai Pembentuk Karakter Bangsa
6. Konferensi IAHA
7. Dialog Keragaman Budaya
8. Dialog Budaya Rumpun Melayu
9. Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia
10. Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi
11. Pra Kongres Kebudayaan
12. Publikasi Kesejarahan
13. Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya
14. Jumlah Bimbingan Teknis Bidang Pelestarian Sejarah dan Purbakala
15. Jumlah Pengunjung Situs Cagar Budaya
16. Jumlah Pengunjung Museum
17. Rembuk Nasional Kebudayaan
18. Anugerah Kebudayaan dan Maestro
19. UNESCO Training Workshop on Nomination of World Heritage

20. Penyelenggaraan Sosialisasi Media dalam rangka GN
Pembangunan Karakter Bangsa melalui Kebudayaan
21. Penyelenggaraan Internalisasi Nilai dalam rangka GN
Pembangunan Karakter Bangsa melalui Kebudayaan

Sasaran strategis 3: Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreativitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2012		
			Target	Realisasi	%
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film	4. Jumlah sekolah yang Difasilitasi Sarana Budaya	1400	951	67
		5. Jumlah Fasilitas Film yang Berkarakter	20	20	100
		6. Jumlah Komunitas Budaya yang Difasilitasi	200	125	63

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

4. Indikator Kinerja Utama “Jumlah sekolah yang difasiltasi sarana budaya”

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal fasilitasi sarana budaya dengan target indikator kinerja utama “ Jumlah Sekolah Yang Difasilitasi Sarana Budaya adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan target sebanyak 1400 sekolah selama tahun anggaran 2012. Realisasi capaian sebanyak 951 sekolah atau 67 %.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi sehingga target capaian tidak dapat direalisasi antara lain: tidak semuanya sekolah sebagai sasaran fasilitasi sarana budaya mengirimkan proposal, belum optimalnya komunikasi kepada pihak sekolah khususnya di daerah Indonesia timur, baik melalui telepon/ fax/ surat/ email, kurangnya sosialisasi, dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di tahu depan adalah: melakukan sosialisasi dan meningkatkan komunikasi dengan pihak sekolah penerima bantuan mulai di awal tahun.

1. Indikator Kinerja Utama: Jumlah fasilitasi film yang berkarakter

Fasilitasi film yang berkarakter yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah komunitas film dan kegiatan yang terkait, dengan target indikator kinerja sebanyak 20 film selama anggaran 2012. Capaian kinerja indikator kinerja tersebut sebanyak 20 film, atau 100 %.

Hasil capaian kinerja fasilitasi film yang berkarakter yaitu fasilitasi pembelian film right untuk pemutaran bioskop rakyat dan film keliling, sebanyak 20 film terdiri dari:

1. Alangkah Lucunya Negeri Ini
2. Ayah Mengapa Aku Berbeda
3. Catatan Akhir Sekolah
4. Darah Garuda
5. Garuda di Dadaku
6. Hafalan Shalat Delisa
7. Hati Merdeka
8. Kiamat Sudah Dekat
9. Laskar Pelangi
10. Lima Elang
11. Menibus Impian
12. Merah Putih
13. Naga Bonar
14. Petualangan Sherina
15. Sang Pencerah

- 16. Semesta Mendukung
- 17. Surat Kecil Untuk Tuhan
- 18. 3 Hari 2 Dunia 1 Cinta
- 19. Tendangan Dari Langit
- 20. Untuk Rena

2. Indikator Kinerja Utama: Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi

Komunitas budaya yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah komunitas budaya dan kegiatan terkait dengan target sebanyak 200 komunitas budaya selama anggaran 2012. Capaian kinerja indikator utama tersebut sebanyak 125 atau 63 %.

Realisasi capaian kinerja ini tidak memenuhi target disebabkan beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya

Penyusunan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya sebagai dasar hukum kegiatan Fasilitasi Sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sarana Sarasehan dilakukan dari bulan Juli hingga September 2012. Namun Peraturan Menteri dimaksud baru ditetapkan pada pertengahan November 2012. Hal ini berpengaruh pada kelancaran tahap-tahap kegiatan Fasilitasi Sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sarana Sarasehan, terutama pada tahap pencairan dana. Pencairan dana untuk kegiatan ini baru dilakukan pada awal Desember 2012, menjelang tutup tahun anggaran.

2. Informasi Kegiatan Fasilitas Sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sarana Sarasehan

Belum terbitnya dasar hukum kegiatan Fasilitas Sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sarana Sarasehan berdampak pada tahap penerimaan proposal dari komunitas budaya. Informasi kepada komunitas-komunitas budaya yang ada di Indonesia tidak merata dan baru dilakukan belakangan, sehingga terjadi ketimpangan persebaran jumlah proposal komunitas budaya berdasar wilayah administratif (Kabupaten/Kota dan Provinsi).

3. Kelengkapan Administrasi Komunitas Budaya

Komunitas-komunitas Budaya yang menjadi bidang tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi tidak memiliki kelengkapan administrasi formal sebagai organisasi/komunitas. Ketidadaan kelengkapan administrasi ini berkaitan dengan kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial komunitas-komunitas budaya tersebut.

Komunitas-komunitas budaya mengalami kesulitan untuk melengkapi syarat administrasi sesuai persyaratan Petunjuk Teknis Fasilitas dalam waktu singkat. Teknisnya, komunitas budaya memerlukan pendampingan untuk melengkapi syarat administrasi dimaksud.

4. Proposal tidak langsung dari Komunitas Budaya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya dan Petunjuk Teknik Fasilitas mensyaratkan bahwa proposal pengajuan harus berasal dari Komunitas Budaya. Namun, beberapa proposal pengajuan bantuan yang dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi bukan langsung berasal dari Komunitas Budaya dimaksud.

Proposal berupa rekomendasi pemberian bantuan kepada Komunitas Budaya yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Selain itu, proposal pengajuan

juga bukan berasal dari komunitas yang menjadi bidang tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Sehingga proposal-proposal tersebut tidak ditindaklanjuti atau tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.

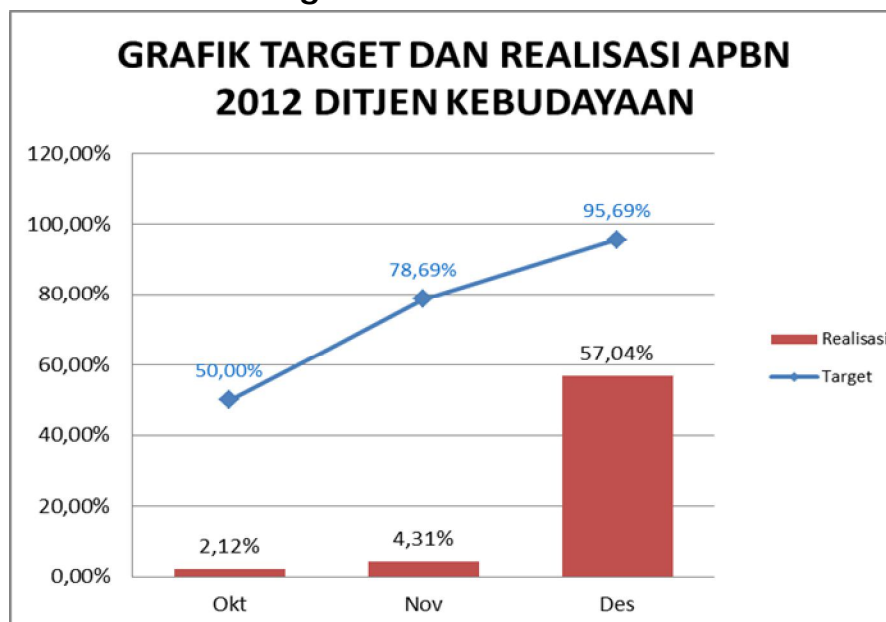
5. *Pendampingan tidak maksimal*

Pendampingan Komunitas Budaya oleh Penyuluh dilakukan dalam rangka pemberdayaan Komunitas Budaya dimaksud kurang maksimal. Pemberdayaan dalam hal ini meliputi kepemilikan syarat-syarat formal sebagai organisasi/komunitas yang diakui oleh Negara, kemampuan melakukan pembukuan transaksi serta penyusunan laporan kegiatan.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas langkah antisipasi yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik di masa datang adalah:

1. Kegiatan bantuan sosial harus dipersiapkan dengan waktu yang cukup
2. Perlu dukungan instrumen teknis untuk mendukung kegiatan bantuan sosial

II. Akuntabilitas Keuangan



BAB IV

P E N U T U P

Kinerja Utama Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2012, dari enam kinerja utama, sebanyak dua kinerja utama dapat dicapai melebihi target yang ditentukan, satu kinerja utama dicapai sesuai target yang ditentukan, dan tiga kinerja utama tidak dapat dicapai sepenuhnya. Ketiga kinerja utama yang belum dapat tercapai sepenuhnya yaitu: jumlah cagar budaya yang dilestarikan, jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya, dan jumlah komunitas budaya yang difasilitasi.

Kinerja utama, jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 6.470 cagar budaya, terdiri dari jumlah cagar budaya yang didaftarkan, dan jumlah cagar budaya yang didokumentasikan, tidak dapat tercapai karena: belum selesainya pembuatan system registrasi nasional cagar budaya secara *on-line*, belum dilaksanakannya pembinaan teknis petugas pendaftaran cagar budaya di daerah, dan belum terfasilitasi pendaftaran cagar budaya di daerah.

Pelestarian cagar budaya sebagai amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlu segera diselesaikan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah tentang Register Nasional Cagar Budaya, dan Peraturan Pemerintah tentang Museum.

Sejalan dengan penyelesaian peraturan pemerintah tersebut perlu diselesaikan juga pedoman pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya dan pedoman pelestarian cagar budaya lainnya, sehingga target kinerja utama pelestarian cagar budaya di tahun 2013 dapat tercapai.

Upaya memperkuat integrasi fungsi kebudayaan dalam pendidikan perlu penguatan budaya di masyarakat melalui pemberian fasilitas sarana kesenian untuk sekolah-sekolah. Target kinerja utama sebanyak 1.400 sekolah yang difasilitasi sarana budaya, baru terealisasi sebanyak 951 sekolah atau 67%. Realisasi capaian ini perlu ditingkatkan di tahun 2013.

Pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah, perlu pemberian fasilitas untuk organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas tradisi. Target kinerja utama sebanyak 200 komunitas budaya, baru dapat terealisasi sebanyak 125 komunitas budaya atau 63%. Realisasi capaian kinerja utama ini perlu ditingkatkan dengan tersedianya standar dan kriteria yang jelas, dan akreditasi dari lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang akan difasilitasi.

Selain itu juga, media belajar untuk peserta didik secara langsung seperti museum, cagar budaya, dan taman budaya, perlu dilakukan revitalisasi sehingga dapat digunakan lebih optimal oleh peserta didik untuk mempelajari kekayaan budaya Bangsa Indonesia.